

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Nama Organisasi : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dalam dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, dan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
  - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
  - f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi, Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
SS1	Terwujudnya kualitas ASN yang berkompeten dalam perwujudan pemerintahan yang terpercaya.	Persentase ASN yang berkualitas dan berkinerja dibidang kesatuan bangsa dan politik.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah ASN yang berkualitas dan berkinerja}}{\text{Jumlah ASN yang tidak berkualitas dan berkinerja}} \times 100\%$ = 90%
SS2	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	Persentase peserta yang memahami kehidupan masyarakat yang harmonis antar suku, umat beragama dan golongan.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah peserta yang paham antar suku, umat beragama dan golongan}}{\text{Jumlah peserta yang tidak paham antar suku, umat beragama dan golongan}} \times 100\%$ = 90%
SS3	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Persentase masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila}}{\text{Jumlah masyarakat yang tidak paham akan nilai-nilai Ideologi Pancasila}} \times 100\%$ = 80%
SS4	Meningkatnya wawasan tentang pendidikan etika budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai sosial budaya daerah dan kehidupan berdemokrasi.	Persentase masyarakat dapat mengaktualisasikan pendidikan etika dan budaya politik.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah masyarakat yang dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik}}{\text{Jumlah masyarakat yang tidak dapat mengaktualisasikan pendidikan dan etika politik}} \times 100\%$ = 80%
SS5	Meningkatkan fasilitasi kelembagaan partai politik dan mediasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.	Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah Parpol yang telah diverifikasi}}{\text{Jumlah Parpol yang belum diverifikasi}} \times 100$ =100%

		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	<b>70%</b>
		Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemilukada.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Jumlah kabupaten yang melaksanakan Pemilukada}}{\text{Jumlah kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilukada}} \times 100 = 100\%$
SS6	Menguatnya pembinaan Ormas, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika.	Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Persentase Ormas yang menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika}}{\text{Persentase Ormas yang tidak menjalankan program pencegahan, penyalahgunaan Narkotika}} \times 100 = 100\%$
		Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Persentase Ormas yang telah terbina dan memperoleh SKT}}{\text{Persentase Ormas yang tidak terbina dan memperoleh SKT}} \times 100 = 100\%$
SS7	Meningkatnya stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui antisipasi dini dan cegah dini.	Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.	<b>Formulasi pengukuran :</b> $\frac{\text{Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditangani}}{\text{Persentase stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang tidak ditangani}} \times 100 = 100\%$

Mamuju, Januari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Sulawesi Barat

**Drs. H. HERDIN ISMAIL, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700701 199101 1 004